

**KETENTUAN PENGESAHAN PERCERAIAN DI LUAR
MAKHAMAH SYARIAH DALAM SEKSYEN 55 ORDINAN 43
UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM SARAWAK 2001 DAN
RELEVANSINYA BAGI KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Salina Binti Raduan

NIM. C41216055



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salina Binti Raduan

NIM : C41216055

Fakultas /jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi :Ketentuan Pengesahan Perceraian di Luar
Makhamah Syariah Dalam Seksyen 55 Ordinan 43
Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 Dan
Relevansinya Bagi Kompilasi Hukum Islam.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian/
karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2020
Saya yang menyatakan



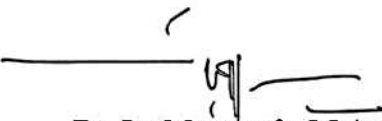
Salina Binti Raduan
N.I.M. C41216055

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Salina Binti Raduan N.I.M. C41216055 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Julai 2020

Pembimbing,



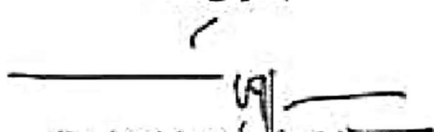
Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP.197908012011012003

PENGESAHAN

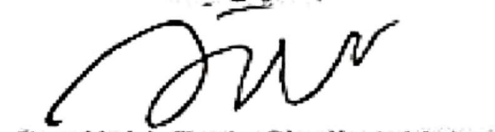
Skripsi yang ditulis oleh Salina Binti Raduan N.I.M. C4121655 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada hari 3 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

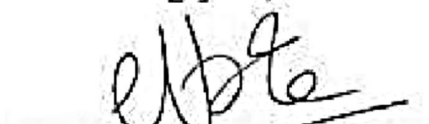
Penguji I,


Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP. 197908012011012003

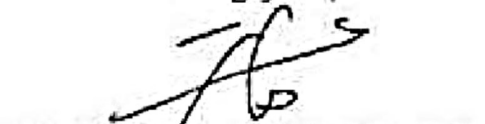
Penguji II,


Drs. H. M. Zavin Chudlari, M.Ag
NIP. 195612201982031003

Penguji III,


Hj. Nabila Nailly, S.SI., MH
NIP. 198102262005012003

Penguji IV,


Riza Multazam Luthfy, SH., MH
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 28 Agustus 2020

Mengesahkan.

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Salina Binti Raduan
NIM : C41216055
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : salina94raduan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**KETENTUAN PENGESAHAN PERCERAIAN DI LUAR MAKHAMAH SYARIAH
DALAM SEKSYEN 55 ORDINAN 43 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
SARAWAK 2001 DAN RELEVANSINYA BAGI KOMPILASI HUKUM ISLAM**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Maret 2021

Penulis


(*Salina Binti Raduan*)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan judul “Ketentuan Pengesahan Perceraian di Luar Mahkamah Syariah Dalam Seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 dan Relevansinya Bagi Kompilasi Hukum Islam. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang menimbulkan dalam rumusan masalah yaitu: bagaimana ketentuan pengesahan di luar Mahkamah Syariah dalam seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 dan bagaimana relevansi ketentuan pengesahan perceraian di luar Mahkamah Syariah dalam seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 dengan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini sumber data yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan pengesahan perceraian di luar Mahkamah Syariah sangat relevan diterapkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai kekurangan yaitu dalam penetapan sanksi dan tempo pengesahan perceraian untuk dijadikan nilai kemaslahatan umat Islam di Indonesia serta dapat membantu agar mematuhi hukum yang berlaku.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PENYATAAN KEASLIAN BERMATERAI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahas	17
BAB II FAKTOR-FAKTOR KETENTUAN PENGESAHAN PERCERAIAN	
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Adalah karena negara Indonesia berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian. Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/Jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.²

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “Kawin” yang secara bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis: melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³ Dalam bahasa Melayu (terutama di Malaysia dan Brunei Darussalam), digunakan istilah kahwin. Kahwin ialah “Perikatan yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan menjadi suami istri, nikah.” Berkahwin maksudnya sudah mempunyai istri (suami).⁴

¹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undangan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

³ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 3, edisi kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

⁴ Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998), 558.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*miitsaqan ghalidzan*).

Perkawinan merupakan ibadah Sunnah yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena melakukannya dengan yang sah. Dalam Al-Quran perkawinan disebutkan dalam surah An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

[illegible]

Perceraian secara bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi “Perceraian”, yang berarti proses putusnya hubungan suami istri⁶. Sementara menurut bahasa Arab, *at-talaq* (Perceraian) berasal dari kata *at-talaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.⁷ Alasan putusnya perkawinan, menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa putusnya perkawinan pada Bab XVI dapat dikarenakan 3 (tiga) alasan yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Seterusnya pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian.

Di Indonesia, dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini berkesesuaian dengan UU No. 5 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara di Malaysia, menurut undang-undang di Sarawak dijelaskan di dalam Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 yaitu Seksyen 45 tentang perceraian dengan talaq atau dengan perintah dalam

⁷ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

Dari penjelasan pembahasan masalah, dapat dirumuskan beberapa rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pengesahan perceraian di luar Mahkamah Syariah dalam seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001?
2. Bagaimana relevansi ketentuan pengesahan perceraian di luar Mahkamah Syariah dalam seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 dengan Kompilasi Hukum Islam?

Adapun penelitian yang sedikit berhubungan dalam karya tulis ini adalah:

1. Skripsi yang ditulis Abu Ubaidah Bin Fadzli, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul: *Kedudukan dan Konsekuensi Hukum Talak Luar Sidang Pengadilan di Indonesia dan Malaysia: (Studi Komparatif di Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak) Tahun 2018*. Penelitian ini

5. Skripsi yang ditulis Dofir, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010 yang berjudul: *Kedudukan Hukum Pengucapan Ikrar Talak di luar Pengadilan Agama (Studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*. Penelitian ini membahas kedudukan hukum talak di luar Pengadilan Agama dalam Perspektif Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hukum talak tidak sah menurut UU No. 1 Tahun tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, meskipun fiqh menyatakan sah talak di luar pengadilan tapi tidak mempunyai kekuatan hukum positif.

Perbedaan tersebut adalah penelitian ini tidak mengkaji lebih jelas tentang pengesahan perceraian di luar Mahkamah Syariah dalam seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 dan Relevansinya bagi Kompilasi Hukum Islam. Kajian ini adalah kajian yang mendalam kajian sebelumnya tentang talak di luar pengadilan.

Dari persamaan dan perbedaan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada yang mengkaji skripsi ini yang berjudul “Ketentuan Pengesahan Perceraian di Luar Mahkamah Syariah Dalam Seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 dan Relevansinya Bagi Kompilasi Hukum Islam”.

Untuk memudahkan memahami suatu kekeliruan dan kesalahan di dalam proposal ini, penulis mengemukakan pengertian dan penjelasan supaya penulisan ini dapat dipahami dengan judul “*Ketentuan Pengesahan Perceraian di Luar Mahkamah Syariah dalam Seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 Dan Relevansinya Bagi Kompilasi Hukum Islam*”, sebagai berikut:

Memeriksa atau menyelidik dan memastikan lafaz tersebut adalah talak yang mengikuti hukum syara' atau tidak sesuai dengan hukum syara'.

Suatu peraturan perundang-undangan tentang Hukum Keluarga Islam mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, penjagaan, dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan kehidupan keluarga yang berlaku di Sarawak

Hukum materil bagi Pengadilan Agama yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 yang terdiri dari Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan.

a) *Mashlahah al-Mu'tabarah* (suatu *mashlahat* yang diakui oleh dalil *syara'*)

b) *Mashlahah al-Mulghah* (suatu *mashlahat* yang bertentangan dengan dalil *syara'*)

[illegible]

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Demi menjaga eksistensi dan menambah kenikmatan materi dan religi, manusia termotivasi untuk mencari harta serta tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Dalam semua motivasi dibatasi dengan tiga syarat yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah Swt dan masyarakat tempat dia hidup.³²

Shari'at Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinaan, dimana perlakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam. Allah Swt dalam surat An-Nuur ayat 2 yang berbunyi:

فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ

Wanita dan laki-laki yang berzina maka jilidlah masing-masing mereka 100 kali. Dan janganlah belas kasian kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan

[illegible]

b) Berakal sehat

Hukum ṭalaq dapat diterima ketika dilakukan oleh orang yang berakal, sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw. Berbunyi:

يَفِيقَ

Dari Abi Hurairah r.a., dari Nabi Muhammad saw., bersabda:

“Setiap talaq boleh, kecuali talaq anak kecil dan orang gila.”

Khiyar, artinya tidak dalam keadaan terpaksa atau atas dasar kehendak hati, bukan berdasarkan tekanan-tekanan dari luar. Dengan demikian, apabila suami dipaksa untuk menjatuhkan talak kepada istrinya yang disertai dengan ancaman-ancaman, baik fisik

[illegible]

“Sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan, kelupaan, dan paksaan pada umatku demi aku.” (HR. Ibnu Majah, al-Baihaqi dan yang lainnya).

2) Syarat bagi istri yang diṭalaq

a) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah ṭalaq raj'i dari suaminya dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Apabila pada masa itu suami menjatuhkan ṭalaq lagi, dipandang jatuh ṭalaqnya sehingga menambah jumlah ṭalaq yang dijatuhkan mengurangi hak talaq yang dimiliki suami. Dalam hal talaq ba'in,

[illegible]

Talaq yang dilakukan ketika istri mengabaikan hak-hak Allah Swt, yang telah diwajibkan kepadanya. Misalnya, shalat, puasa, dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak mampu memaksanya atau istrinya sudah tidak lagi mampu menjaga kehormatan dirinya.

Talaq yang dilakukan karena adanya kebutuhan. Misalnya, karena buruknya akhlak istri dan kurang baik pengaulan yang hanya mendatangkan mudarat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.⁵⁵

Talaq itu diharamkan jika dengan talaq itu kemudian suami berlaku serong, baik dengan bekas istrinya ataupun dengan wanita lain, suami diharamkan menjatuhkan talaq jika hal itu mengakibatkan terjatuhnya suami ke dalam perbuatan haram.⁵⁶

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa *ṭalaq* diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu, karena *ṭalaq* yang demikian menimbulkan madharat, baik bagi suami maupun diri istri, serta melenyapkan kemashlahatan

⁵⁵ Ibid., 217.

⁵⁶ Ibid., 216.

Pertengkaran, percekocan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan dan hilangnya rasa percaya yang terus memicu perceraian. Sementara perselisihan yang berakhir dengan baik dengan menyadari dan mengetahui perasaan masing-masing, bersikap empati dan mau memaafkan kesalahan pasangannya.⁶⁴

Pasangan suami istri belum memiliki keturunan yang bisa menyebabkan tuduhan salah satunya suami istri yang mandul tidak bisa mendapatkan anak. Pertengkaran ini sering terjadi dampaknya sang istri, yang selalu dituduh tidak mampu memberi keturunan.⁶⁵

⁶⁵ Ibid., 148.

Dalam Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 ini menjelaskan terdapat beberapa bagian yaitu 1. Pemulaan; 2. Perkawinan; 3. Pendaftaran perkawinan; 4. Penalti dan pelbagai peruntukan berhubung dengan akad nikah dan pendaftaran perkawinan; 5. Pembubaran perkawinan; 6. Nafkah istri, anak dan lain-lain; 7. Penjagaan; 8. Pelbagai; 9. Rayuan; 10. Penalti; 11. Am; dan 12 pemansuhkan dan peruntukan hal-hal pengecualian.¹⁴

2. Ketentuan Pengesahan Seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001.

Dalam Ordinan ini tidak mengatur istilah *ṭalaq*, tetapi Ordinan ini digunakan oleh Mahkamah Syariah sebagai sumber rujukan yang mengikuti “Undang-Undang Islam”. Dalam seksyen 2 ayat 1 tentang “tafsir” yang menggunakan makna lain terdapat dalam Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001. Makna lain bagi “Undang-Undang Islam”

¹⁴ Ibid., 1-8.

1. *Al Bajuri*
2. *Fathul Muin* dengan Syarahnya
3. *Syarqawi alat Tahrir*
4. *Qulyubi/Muhalli*
5. *Fathul Wahab* dengan Syarahnya
6. *Tuhfah*
7. *Targhibul Musytaq*
8. *Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Usman bin Yahya*
9. *Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Shodaqah Dahlan*
10. *Syamsuri Lil Fara'idl*
11. *Al-Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah*
12. *Bughyatul musytarsidin*
13. *Mughnil Muhtaj*

Pada perkembangan zaman kesadaran hukum dalam masyarakat dan perkembangan hukum Islam di Indonesia sendiri pada bagian abad 20 menunjukkan bahwa kitab-kitab fiqh tersebut menunjukkan bahwa tidak

⁴⁴ Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958, tentang Pembentukan Pengadilan Agama Makhamah Syar'iah di luar Jawa dan Madura.

Pembatasan 13 kitab yang dilakukan oleh Departemen Agama pada tahun 1958 yang digunakan diperadilan Agama adalah merupakan upaya kearah kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan apa yang dilakukan dinegara-negara tersebut. Dan dari situlah kemudian timbul gagasan untuk membuat Kompilasi hukum Islam sebagai buku hukum di Pengadilan Agama.

Hakim perlu memperhatikan kesadaran hukum masyarakat pasal 20 ayat 1 yang berbunyi: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan yang hidup masyarakat”. Kemudian juga yang

[illegible]

Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan bagi orang Islam adalah hukum Islam begitu juga bagi agama lain. Maka untuk tercapainya kepastian hukum maka dituntut adanya hukum tertulis yang memiliki daya ikat, oleh karena itu KHI merupakan jawabannya. Undang-Undang No. 14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1.⁴⁹

Kompilasi disusun untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia, yang mengarah pada unifikasi mazhab dalam hukum Islam dan sistem hukum Indonesia kompilasi merupakan kodifikasi hukum yang mengarah pada pembangunan hukum nasional.⁵⁰

Kompilasi Islam sekarang diberlakukan dilingkungan peradilan agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang Islam, kompilasi tidak dihasilkan dari legislasi dewan

⁴⁹ Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 dinyatakan “Atas putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang diatur dalam Undang-Undang.

[illegible]

perwakilan rakyat tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang digagaskan oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang melibatkan beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia. Dasar legalitas berlakunya KHI adalah Presiden tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.⁵¹

**ANALISIS TERHADAP RELEVANSI KETENTUAN PENGESAHAN
PERCERAIAN DI LUAR MAKHAMAH SYARIAH DALAM SEKSYEN 55
ORDINAN 43 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM SARAWAK 2001
DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 merupakan undang-undang di bidang keperdataan yang hanya berlaku di Sarawak, Malaysia. Ordinan ini merupakan rangkaian Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak yang biasa digunakan sebagai referensi pada Mahkamah Syariah Sarawak (Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak) dengan mengikuti undang-undang Islam. Undang-undang Islam adalah dalam seksyen 2 ayat 1 tentang “tafsir” yang menggunakan makna lain terdapat dalam Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001. Makna lain bagi “Undang-Undang Islam” artinya Undang-Undang Islam mengikuti Mazhab Syafie atau mengikuti salah satu Mazhab Maliki, Hanbali atau Hanafi sebagaimana yang diputuskan oleh Majlis¹. Di dewan “Undangan Negeri Sarawak” melalui “Badan Perundangan Sarawak” telah melakukan amendemen terhadap Ordinan

78

at beberapa manfaat bagi seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Sarawak 2001 seperti berikut:

1. **Keuntungan**

Am Seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Sarawak 2001 secara jelas dinyatakan apabila suami menandatangani Syariah kepada istri, maka suami akan pengesahan perceraian dalam tempo waktu 7 hari. Hal ini akan dalam Seksyen 128 Ordinan 43 Undang-Undang Sarawak 2001 secara jelas dinyatakan “apabila suami mengucapkan kata-kata tersebut dalam Syariah dalam macam-macam bentuk

at beberapa manfaat bagi seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Sarawak 2001 seperti berikut:

1. **Keuntungan**

Am Seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Sarawak 2001 secara jelas dinyatakan apabila suami menandatangani Syariah kepada istri, maka suami akan pengesahan perceraian dalam tempo waktu 7 hari. Hal ini akan dalam Seksyen 128 Ordinan 43 Undang-Undang Sarawak 2001 secara jelas dinyatakan “apabila suami mengucapkan kata-kata Syariah dalam macam-macam bentuk

at beberapa manfaat bagi seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Sarawak 2001 seperti berikut:

1. **Keuntungan**

Am Seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Sarawak 2001 secara jelas dinyatakan apabila suami menandatangani Syariah kepada istri, maka suami akan pengesahan perceraian dalam tempo waktu 7 hari. Hal ini akan dalam Seksyen 128 Ordinan 43 Undang-Undang Sarawak 2001 secara jelas dinyatakan “apabila suami mengucapkan kata-kata tersebut dalam Syariah dalam macam-macam bentuk

at beberapa manfaat bagi seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Sarawak 2001 seperti berikut:

1. **Keuntungan**

Am Seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Sarawak 2001 secara jelas dinyatakan apabila suami menandatangani Syariah kepada istri, maka suami akan pengesahan perceraian dalam tempo waktu 7 hari. Hal ini akan dalam Seksyen 128 Ordinan 43 Undang-Undang Sarawak 2001 secara jelas dinyatakan “apabila suami mengucapkan kata-kata tersebut dalam Syariah dalam macam-macam bentuk

at beberapa manfaat bagi seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Sarawak 2001 seperti berikut:

1. **Keuntungan**

Am Seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Sarawak 2001 secara jelas dinyatakan apabila suami menandatangani Syariah kepada istri, maka suami akan pengesahan perceraian dalam tempo waktu 7 hari. Hal ini akan dalam Seksyen 128 Ordinan 43 Undang-Undang Sarawak 2001 secara jelas dinyatakan “apabila suami mengucapkan kata-kata tersebut dalam Syariah dalam macam-macam bentuk

t.

at beberapa manfaat bagi seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Sarawak 2001 seperti berikut:

dana

am Seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Sarawak 2001 secara jelas dinyatakan apabila suami menandatangani Syariah kepada istri, maka suami wajib mengesahkan perceraian dalam tempo waktu 7 hari setelah ditandatanganinya, pihak SARAWAK

nakan dalam Seksyen 128 Ordinan 43 Undang-Undang Sarawak 2001 secara jelas dinyatakan “apabila suami mengucapkan kata-kata talak atau faskah menurut hukum Islam di hadapan Syariah dalam macam-macam bentuk

Syariah dengan Kompilasi Hukum Islam.

memelihara kepentingan manusia.³

mafsadat (kerusakan/akibat buruk), baik di dunia dan di akhirat.

yang asas yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group), 27.

⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, jilid I, cet. III (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), 195.

Dengan demikian, dalil di atas bisa digunakan untuk menguatkan pentingnya talaq dilakukan di Pengadilan Agama sehingga perlu ada pengesahan talaq sebagaimana ketentuan pengesahan perceraian di luar Mahkamah Syariah dalam seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam hanya mengesahkan talaq di depan Pengadilan agama. Sedangkan pengucapan talaq di luar Pengadilan Agama tidak disahkan oleh negara padahal menurut Agama adalah sah. Dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam sudah cukup jelas mengenai talaq adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi satu sebab putusnya perkawinan, dengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.⁶

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 207-210.

[illegible]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seksyen ini sangat membantu dan sangat relevan bagi Kompilasi Hukum Islam yang mengenai sanksi atau hukum pidana karena dengan wujud sanksi atau denda maka segala macam yang menjadi permasalahan kepentingan bisa dipenuhi sekaligus bisa berupa amaran bagi masyarakat yang tidak mematuhi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fikih Sosial*. Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Mannan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, No. 2, Vol. 2, 2014.
- Mohamad Ibrahim, Ahmad. et al. *System Undang-Undang*. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet. 32. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mukhtar Al-Khadimi, Nuruddin. *al-Ijtihad al-Maqashid*. Qatar: t.p., 1998M.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam: Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungan nya dengan Metode Istimbath Hukum". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 3, Vol. 19, Agustus, 2017.
- Nasohah, Zaini. *Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia Sebelum dan Sesudah Merdeka*. Kuala Lumpur: Yayasan Islam Terengganu, 2001.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. jilid II. Jakarta: UI Press, 1984.
- Nuruddin, Amir. et al. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- _____. et al. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undangan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

